

## Daftar Pustaka

### 1. Buku-Buku

- A. Kohar, 1985, *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indra Karya, Surabaya,
- A. Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta,
- Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Cet V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, Cet. I, Ind, Hil-Co, Jakarta.
- Habib Adjie, 2003, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem"*, Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya,
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Lexy Moeleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, Alumni, Bandung.
- , 2009. *KUHPERDATA Buku III*. Alumni, Bandung.
- Muhammad Adam, 1995, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, Bandung,
- Nico, 2003, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta,
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

R. Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1992, *Aneka Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim HS, 2003. *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cet. II*, Libaerty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

### 3. Artikel dan Makalah

Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem”*, Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya, 2003,

Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992

Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006

N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006,

Wisnubroto, *Menelusuri dan Memaknai Hukum Progresif*, Bahan FGD LBH Yogyakarta dan SPHP (Serikat Pekerja Hukum Progresif), Yogyakarta, 8 April 2006, dapat diakses melalui <http://www.docstoc.com/docs/24618082/Menelusuri-and-Memaknai-Hukum-Progresif>